

**PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA ACEH
PENGANGGURAN DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN
DI PROVINSI ACEH**

**THE EFFECT OF THE ACEH REVENUE AND EXPENDITURE
BUDGET, UNEMPLOYMENT AND INFLATION
ON POVERTY IN ACEH PROVINCE**

Ade Fadillah FW Pospos

Institut Agama Islam Negeri Langsa

ade.pospos@iainlangsa.ac.id

Aida Shafira

Institut Agama Islam Negeri Langsa

aidashavyraa@gmail.com

Muhammad Dayyan

Institut Agama Islam Negeri Langsa

muhammad.dayyan@iainlangsa.ac.id

Abstract

Poverty is a problem for the country and for regions in Indonesia, including the province of Aceh. It is also known from the news that Aceh is a poor area on the island of Sumatra. The government is trying to reduce the percentage of poverty by pursuing development through government programs using the Aceh Revenue and Expenditure Budget. In addition, the unemployment rate of the community also has an impact on poverty because they have no income. Likewise with inflation, if there is an increase, it will have an impact on decreasing people's purchasing power and can be a cause of poverty. This research was conducted with the aim of knowing the effect of APBD, unemployment and inflation on poverty in Aceh Province. The data used are secondary data in the form of APBD, unemployment and inflation and poverty for 2006-2020 obtained from the Directorate General of Fiscal Balance, Ministry of Finance and the Central Statistics Agency for Aceh. Data analysis used multiple linear regression, t test and F test and the coefficient of determination (R²) test. The results showed that the Regional Revenue and Expenditure Budget had a negative and significant effect on poverty. Unemployment and inflation have a positive and insignificant effect on poverty. As much as 88.8% of the Regional Revenue and Expenditure Budget, unemployment and inflation can explain the poverty variable in Aceh Province.

Keywords: APBD, unemployment, inflation and poverty

Abstrak

Kemiskinan menjadi masalah bagi negara dan bagi daerah-daerah yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh. Hal tersebut juga diketahui dari pemberitaan bahwa Aceh merupakan daerah miskin di pulau Sumatera. Pemerintah berusaha mengurangi persentase kemiskinan dengan mengupayakan pembangunan melalui program-program pemerintah dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh. Selain itu tingkat pengangguran masyarakat turut berdampak pada kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Demikian halnya dengan inflasi bila terjadi peningkatan, maka akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat serta dapat menjadi penyebab kemiskinan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh APBD, pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan data sekunder berupa APBD, pengangguran dan inflasi serta kemiskinan tahun 2006-2020 yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Aceh. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji t dan uji F serta uji koefisien determinasi (R^2). Hasil penelitian diketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Pengangguran dan inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sebesar 88,8% Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengangguran dan inflasi dapat menjelaskan variabel kemiskinan di Provinsi Aceh.

Kata Kunci: APBD, pengangguran, inflasi dan kemiskinan.

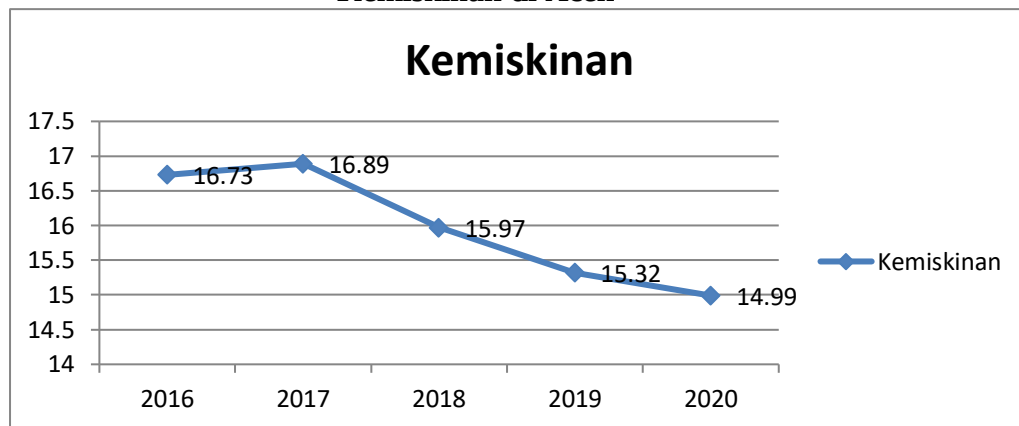
A. Pendahuluan

Indonesia memiliki tujuan pembangunan salah satunya pengentasan kemiskinan. Namun, kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menunjukkan hasil yang optimal. Masih terjadi kesenjangan antara rencana dan pencapaian tujuan karena kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan lebih berorientasi pada program sektoral.

Kemiskinan merupakan masalah bagi negara terutama pemerintah yang sedang berkuasa belum mampu untuk memberi kesejahteraan pada setiap lapisan masyarakat. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh manusia. Masalah kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahannya dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia, walaupun sering sekali tidak disadari kehadirannya oleh manusia yang bersangkutan (Suliswanto, 2014).

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah paling barat Indonesia juga memiliki tingkat kemiskinan. Mengenai kemiskinan di Aceh dapat diketahui berdasarkan data tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang mengalami kenaikan dan penurunan, seperti pada gambar dibawah ini

Gambar 1
Kemiskinan di Aceh

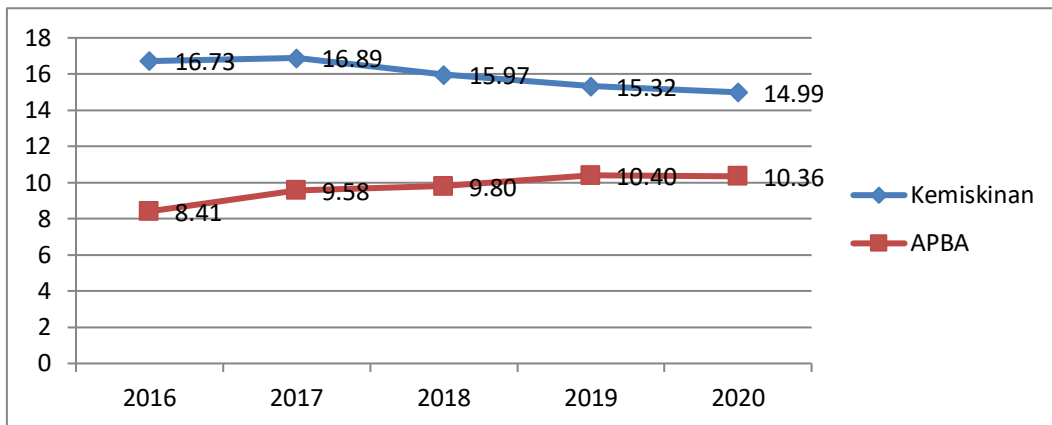


Sumber: BPS Aceh (2021)

Berdasarkan gambar di atas maka dapat diketahui tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan atau artinya kemiskinan berkurang dan hal ini sesuai harapan bahwa kemiskinan terus menurun jumlahnya namun di tahun 2017 kemiskinan mengalami peningkatan atau jumlah masyarakat miskin bertambah di tahun 2017. Kemiskinan menurut T. Ahmad Dadek (Kepala Bappeda Aceh) kemiskinan di tahun 2020 berkaitan dengan pandemi Covid-19. Pandemi telah meningkatkan persentase kemiskinan secara nasional dan juga di Aceh. (Diskominfo Aceh)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) adalah suatu rencana kerja pemerintah yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan moneter yang mencerminkan sumber-sumber penerimaan daerah dan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pada hakekatnya APBA merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. APBA diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman daerah yang dimiliki.

Gambar 2
Kemiskinan dan APBA Provinsi Aceh

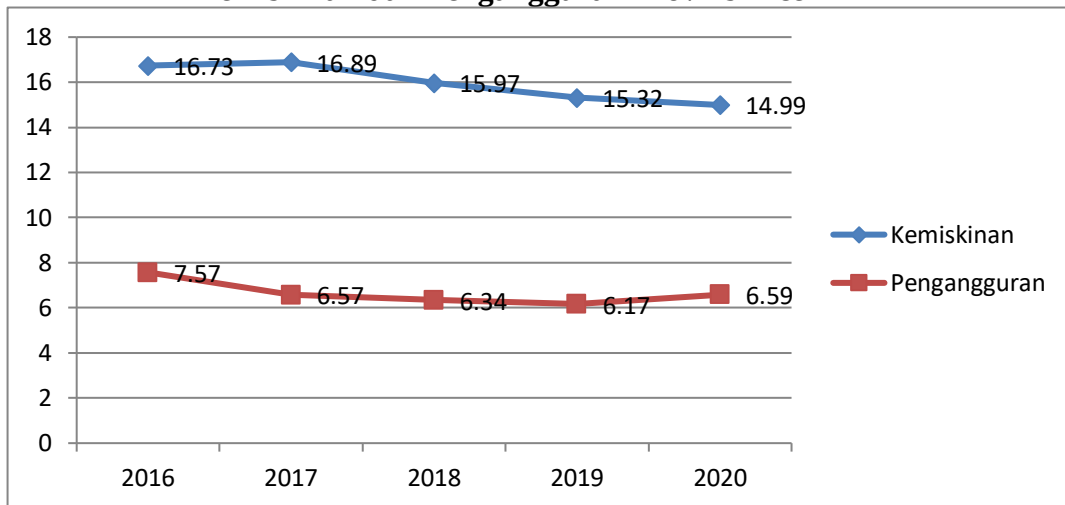


Sumber: BPS Aceh (2021)

Gambar di atas menunjukkan bahwa APBA dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya anggaran pendapatan dan belanja Aceh diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang ada di Provinsi Aceh serta mengurangi kemiskinan. Namun kenaikan APBA belum seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan, karena pada tahun 2017 nilai APBA meningkat persentasenya menjadi 9,58% dari sebelum 8,41%. Seharusnya peningkatan APBA dapat menurunkan kemiskinan di tahun 2017. Namun persentase kemiskinan di tahun 2017 meningkat menjadi 16,89% dari tahun sebelumnya sebesar 16,73%.

Inflasi merupakan sebuah proses meningkatnya harga-harga umum atau menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Inflasi ringan akan mengganggu perekonomian meskipun masih bisa ditoleransi. Inflasi moderat akan bersifat korosif meskipun tidak fatal, dan inflasi berkepanjangan atau *hyperinflation* akan sangat merusak proses perekonomian. Oleh karena itu, inflasi dapat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat serta menurunkan pendapatan (Hakim, 2015).

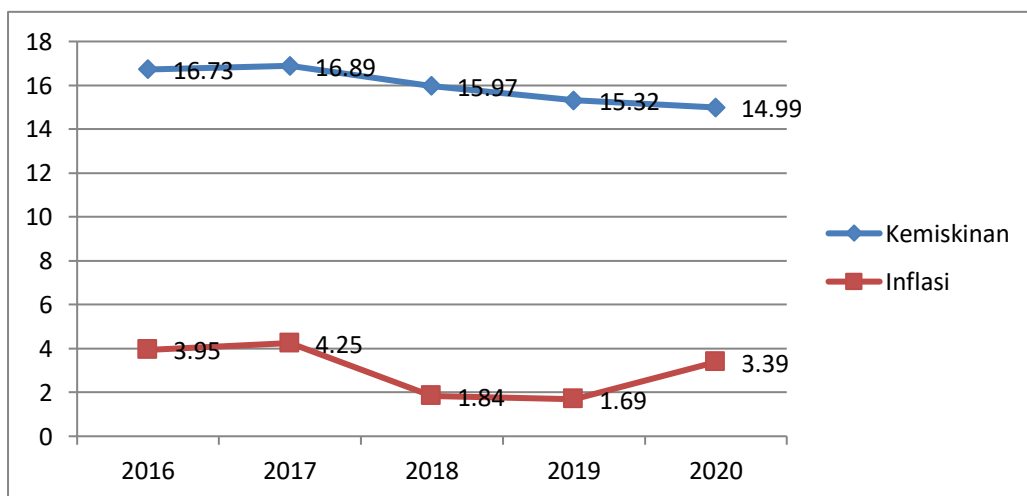
Gambar 3
Kemiskinan dan Pengangguran Provinsi Aceh



Sumber : BPS Aceh (2021)

Gambar 3 memberikan informasi bahwa pengangguran di Provinsi Aceh tahun 2016-2019 mengalami penurunan, artinya pengangguran berkurang dan lebih banyak yang bekerja dan hal ini sesuai harapan daerah sehingga masyarakat memiliki pendapatan dan mengurangi kemiskinan. Tahun 2020 pengangguran meningkat dari 6,17% menjadi 6,59%. Seharusnya pengangguran meningkat akan berdampak pada peningkatan kemiskinan. Namun yang terjadi di tahun 2020 kemiskinan persentasenya menurun dari 15,32% menjadi 14,99%.

Gambar 4
Kemiskinan dan Inflasi di Provinsi Aceh



Sumber : BPS Aceh (2021)

Gambar di atas menunjukkan bahwa inflasi mengalami fluktuasi sejak tahun 2016-2020. Inflasi daerah sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 menurun serta diikuti penurunan persentase kemiskinan. Tetapi pada tahun 2020 persentase inflasi meningkat tetapi kemiskinan menurun persentasenya. Dari uraian latar belakang peneliti tertarik untuk membahas tentang “Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Pengangguran dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh”.

B. Kerangka Teori

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah (UU Keuangan Negara, 2002). Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya (Sadono, 2015). Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga umum secara terus menerus. Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa kenaikan satu atau beberapa pada suatu saat tertentu dan hanya “sementara” belum tentu menimbulkan inflasi. Gejala kenaikan umum yang cepat atau tinggi selama periode waktu tertentu disebut keadaan inflasi (Masyhuri, 2012). Kemiskinan merupakan kondisi kurang mampu dari masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup paling dasar (Sadono, 2015)

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif jenis asosiatif yang merupakan penelitian berdasarkan falsafah positivisme yaitu ilmu yang valid, konkrit, objektif, teramati, terukur, rasional dan sistematis (Sugiono, 2012). Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya berupa angka, lalu diolah dengan rumus statistik tertentu dan diinterpretasikan dalam rangka menguji hipotesis yang telah disiapkan lebih dahulu, serta lazim bertujuan mencari sebab akibat sesuatu. penelitian kuantitatif cenderung meneliti lebih dari satu variabel (Sukidin, 2015).

Penelitian ini bersifat asosiatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala (Wiratna, 2015).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, pengangguran, inflasi dan kemiskinan di Provinsi Aceh periode 2006 sampai dengan 2020, yang dapat diakses melalui www.aceh.bps.go.id.

Sampel dalam penelitian ini adalah Provinsi Aceh dengan data pengangguran, inflasi dan kemiskinan serta dari DJPK data Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dari tahun 2006-2020 atau $n = 15$.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari:

1. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2010). Data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian ini diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik.

2. Metode Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang berisi buku-buku sebagai bahan bacaan, dikaitkan dengan penggunaannya dalam kegiatan penelitian atau penulisan karya ilmiah, dapat dibagi menjadi kategori yaitu buku utama dan buku penunjang. Apabila buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan, materi demikian merupakan buku utama (Sugiyono, 2021). Data yang diambil penulis dalam metode kepustakaan ini berasal dari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, buku-buku literatur, dan penelitian sejenisnya.

Hipotesis

Hipotesis pada penelitian ini:

1. H_{01} : Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
 H_{a1} : Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

2. H_{02} : Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
 H_{a2} : Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
3. H_{03} : Inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
 H_{a3} : Inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
4. H_{04} : Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), pengangguran dan inflasi tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh
 H_{a4} : Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), pengangguran dan inflasi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh

D. Hasil Penelitian dan Diskusi

1. Pengaruh APBA Terhadap Kemiskinan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh berdasarkan hasil penelitian dengan nilai $t_{hitung} -6,907 > -2,20099$ dan $t_{sig} < \alpha 5\%$ ($0,000 < 0,05$) H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat dinyatakan secara parsial APBA memberikan pengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut karena semakin besar nilai APBA maka banyak kegiatan untuk mengurangi kemiskinan dapat dilakukan pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana umum berupa jalan, pemberian bantuan usaha, pemberian fasilitas kesehatan dan pendidikan. Kemudian nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang meningkat setiap tahunnya (berdasarkan data penelitian 2006-2020) terkecuali tahun 2007.

Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat mengurangi kemiskinan atas penggunaan pendapatan untuk belanja provinsi baik untuk program fisik sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh masyarakat umum maupun belanja untuk program non fisik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, penyuluhan-penyuluhan (ekonomi, pertanian, perikanan, perkebunan dan juga kehidupan sosial). Adanya pembangunan fisik dan non fisik diharapkan dapat mengembangkan perekonomian dan menurunkan kemiskinan di Aceh. Pengaruh APBA terhadap kemiskinan sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dalam APBD mencerminkan kebijakan pemerintahan suatu daerah.

Penyusunan anggaran yang efisien sangat penting karena keterkaitannya dengan berbagai sektor perekonomian lainnya. Kontribusinya yang besar tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan stabilitas ekonomi, serta peningkatan pendapatan per kapita (Suparmoko, 2004). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Debby, 2018)

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh berdasarkan hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,796 < 2,20099$) dan $t_{sig} > \alpha$ 5% ($0,443 > 0,05$) H_0 diterima dan H_a ditolak, dapat dinyatakan secara parsial pengangguran memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini karena pengangguran yang besar dapat menjadi penyebab kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan. Hasil tersebut juga dikarenakan pengangguran adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan. Bila tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan maka tidak memungkinkan untuk memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan. Hal tersebut menjadi indikator untuk masyarakat yang menganggur menjadi miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengangguran mempengaruhi kemiskinan, yang menyebabkan kemiskinan diantaranya adalah, pengangguran penduduk (Subandi, 2016). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dimana pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan (Rukmanasari, 2021).

3. Pengaruh Inflasi terhadap Kemiskinan

Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,620 < 2,20099$) dan $t_{sig} > \alpha$ 5% ($0,548 > 0,05$) H_0 diterima dan H_a ditolak, dapat dinyatakan secara parsial inflasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini karena inflasi yang ada di Aceh masih berada di 1 (satu) digit dan belum terlalu tinggi sehingga tidak nyata mempengaruhi kemiskinan. Inflasi juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi sehingga inflasi tetap dibutuhkan pemerintah untuk mengukur perekonomian.

Inflasi yang terjadi di Aceh berdasarkan data penelitian tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 tidak tetap melainkan berubah-ubah setiap tahunnya. Inflasi tertinggi berdasarkan penelitian mencai 11% dan hal tersebut hanya terjadi 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 dimana tahun tersebut terjadi krisis global dan berdampak pada berbagai negara dan termasuk Aceh yang merupakan bagian dari negara Indonesia. Inflasi secara umum di Aceh masih dalam kondisi 1 (satu) digit dan tidak terlalu berdampak pada kemiskinan. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya adalah inflasi penduduk. (Subandi, 2016) Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, dimana inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan (Imelia, 2012).

4. Pengaruh APBA, Pengangguran dan Inflasi terhadap Kemiskinan

APBA, Pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh yang diketahui dari hasil nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($37,948 > 3,59$) dan nilai $F_{sig} < \alpha$ 5% ($0,000 < 0,05$) secara simultan APBA, pengangguran dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Aceh.

Pengaruh signifikan tersebut dikarenakan APBA yang terus meningkat dan digunakan untuk pembangunan dan bermanfaat bagi masyarakat Aceh akan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kemudian pengangguran yang ada turut mempengaruhi kemiskinan, dimana terdapat kemiskinan tetapi persentasenya tidak terlalu besar berdasarkan data penelitian. Sementara inflasi yang terjadi juga tidak tetap atau berubah-ubah setiap tahunnya sehingga mempengaruhi kemiskinan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu dimana inflasi dan pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Intan, 2021). Demikian pada penelitian lain dimana kemiskinan dan pengangguran di Sulawesi Utara bahwa APBD signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Debby, 2018).

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh atas penelitian ini, dapat ditarik kesimpulannya:

1. Hasil penelitian diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji t, $t_{hitung} -6,907 > -2,20099$ dan $t_{sig} < \alpha 5\%$ ($0,000 < 0,05$).
2. Hasil penelitian juga diketahui untuk pengangguran berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji t dengan perolehan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,796 < 2,20099$) dan $t_{sig} > \alpha 5\%$ ($0,443 > 0,05$).
3. Hasil penelitian diketahui untuk inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji t, $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,620 < 2,20099$) dan $t_{sig} > \alpha 5\%$ ($0,548 > 0,05$).
4. Hasil penelitian diketahui bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), pengangguran dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, hal tersebut diketahui dari hasil uji F dengan nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($37,948 > 3,59$) dan nilai $F_{sig} < \alpha 5\%$ ($0,000 < 0,05$).

Daftar Pustaka

- Agus, Muhammad. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhan, Bungin. (2011). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Diskominfo Aceh, "Peningkatan angka kemiskinan", <https://diskominfo.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintah-aceh/peningkatan-angka-kemiskinan-di-aceh-masih-lebih-baik-dari-rata-rata-nasional>, diunduh 01 Januari 2022.
- Ghozali, Imam. (2013). *Analisis Multivariat*, Semarang, BP Undip.
- Hasan, Iqbal. (2012). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hakim. T. (2015). *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Ekonosia.
- <https://www.pahamindonesia.org/gaji-di-bawah-upah-minimum-karena-bergantung-pendapatan-perusahaan/> diunduh 25 Oktober 2021.

- Ihsan, K., & Ikhsan, I. (2018). Analisis Pengaruh Ump, Inflasi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(3), 408-419.
- Imelia. (2012). Pengaruh inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomi*, Vol 1, No 5.
- Indriantoro Nur dan Supomo, Bambang. (2014) *Metode Penelitian*, Yogyakarta: BPFE.
- Karim, Adiwarman A. (2011). *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Kartasaputra G. (2011). *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kuncoro Mudarajad. (2010). *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, UPP YKPN.
- Kurniawan, Acep. (2018). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.
- Machmud, Amir. (2016). *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Erlangga.
- Mankiw Gregori N. (2016). *Makro Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.
- Marisa dan Haryadi. (2016). *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Masyhuri Machfudz, M. Nurhadi Sujoni, (2012). *Teori Ekonomi Makro*, Malang: UIN Maliki Press.
- Moekijat, *Sistem Akuntansi*. (2011). Yogyakarta: BPFE YKPN.
- Pabundu, Tika Moh. (2016). *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah, PP No 78 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi
- Purwanto. (2011). *Statistik untuk Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahardja Prathama dan Manurung Mandala. (2012). *Teori Ekonomi Makro*, Jakarta: LPP FE UI.
- Rahman, Afzalur. (2015). *Doktrin Ekonomi islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakap.
- Retnowati, D., Si, M., & Harsuti, S. E. (2015). Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 47-52.
- Rosandi, Indra Riko. (2017). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 3*.
- Rukmanasari. (2021). Pengaruh Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Wajo, *Skripsi*: Universitas Muhammadiyah Makasar.

- Santoso, Tri Wibowo Budi & Susilo Hadi (2015). *Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saputra, Whisnu Adhi (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota JawaTengah, *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Sarwono, Jhonatan (2012). *Statistik Penelitian*, Yogyakarta: Andi.
- Sembiring, Intan Permata Sari Br, dkk. (2021). Pengaruh Inflasi dan Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Sumatera Utara tahun 2006-2020, *Jurnal Ilmu Sososial, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, Vol 2, No 2.
- Sirusa BPS, <http://sirusa.bps.go.id/indekx.php?=&indikator/wiew&id=44,2021>
- Soeharjoto dan Mitha Rachma Oktavia. (2021). Pengaruh inflasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum terhadap Pengangguran di Indonesia *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, Vol 5. No.2.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (2012). Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. (2016). *Prosedur Penelitian* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujarweni, V. Wiratna, (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukidin dan Mundir. (2015). *Metodologi Penelitian Membimbing dan Mengantar Kesuksesan*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Sukirno Sadono. (2015). *Makro Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suliswanto. (2014) *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: Andi.
- Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.